

Histori dan Urgensi Madrasah pada Pendidikan Islam di Indonesia

Zuhri¹, Muhammad Amin²

¹Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

³ Institut Agama Islam Lukman Edy Pekanbaru
zuhri@uin-suska.ac.id¹, aminzs91@yahoo.com²

Abstract

Madrasah originates from the word darasa, which means a place to sit and learn. In the Indonesian context, the term madrasah has become integrated with the term formal school or institution under the guidance of the Department of Religion. Madrasahs have been prevalent in Indonesia as educational institutions since the early 20th century, coinciding with the emergence of Islamic Mass Organizations (Ormas Islam), such as Muhammadiyah, NU, and others. The development of madrasahs in the early independence period was closely related to the role of the Department of Religion, which was officially established on January 3, 1946. This institution intensively championed the politics of Islamic education in Indonesia. The Department of Religion can be said to be a representation of Muslims in advocating for the wider implementation of Islamic education in Indonesia. In relation to the development of madrasahs in Indonesia, the Department of Religion became a mainstay that could politically elevate the position of madrasahs, thereby gaining serious attention among policy-making leaders.

Keywords:

Histori
Urgensi
Madrasah

Abstrak

Madrasah berasal dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20, hal itu berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

Corresponding Author:

Zuhri
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
zuhri@uin-suska.ac.id

1. PENDAHULUAN

Madrasah merupakan isim makan dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Tetapi tidak demikian dalam sejarahnya. "Madrasah merupakan tahap ketiga dari perkembangan sejarah pendidikan Islam dari urutan pertama yaitu masjid, tahap kedua yaitu Masjid-khan dan

kemudian madrasah”. (Asari: 1994:45). Masjid pada awal-awal perkembangan Islam tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah seperti shalat saja, akan tetapi mesjid digunakan juga sebagai tempat yang muliti guna. Selain fungsi utamanya untuk beribadah, mesjid juga digunakan untuk sentral kegiatan masyarakat muslim saat itu. “Dengan demikian bahwa pada awal-awal perkembangan Islam, masyarakat muslim saat itu telah memperluas fungsi mesjid tidak hanya untuk beribadah sholat, akan tetapi juga digunakan untuk lembaga pengajaran, rumah pengadilan, aula pertemuan bagi tentara, dan rumah penyambutan duta” (Maksum, 1999:54). Sebelum lahirnya madrasah, masjid merupakan tempat yang umum yang biasa dilakukan oleh masyarakat untuk melakukan semua kegiatan di atas.

Ketika rasul dengan para shahabatnya hijrah ke Madinah, salah satu program pertama yang dia lakukan adalah pembangunan sebuah mesjid yang belakangan terkenal sebagai Masjid Nabi. Di masjid inilah sekelompok sahabat yang bergelar ashhab al-shuffah menghabiskan waktu mereka untuk beribadah dan belajar.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bertujuan mengali dari berbagai sumber teks ilmiah berupa buku dan artikel jurnal terkait fokus penelitian. tuda kepustakaan, juga dikenal sebagai studi literatur, adalah metode pengumpulan data dan informasi melalui dokumen-dokumen, seperti buku, jurnal, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan landasan teori, memperluas pengetahuan, dan mendapatkan perspektif yang berbeda tentang masalah yang diteliti.

3. PEMBAHASAN

Madrasah Dalam Sejarah Islam

Praktik nabi menjadi preseden bagi para khalifah dan pengusaha muslim sesudahnya, dan pembangunan masjid berlanjut terus di daerah-daerah kekuasaan muslim. Setiap kota memiliki sejumlah masjid, sebab pembangunannya tidak saja dilakukan oleh pengusaha secara resmi, tetapi juga oleh para bangsawan, hartawan dan swadaya masyarakat pada umumnya.

“Pada masa Khalifah Umar bin Khattab dijumpai sejumlah tenaga pengajar yang secara resmi diangkat oleh khalifah untuk mengajar di masjid-masjid Kuffah, Basrah dan Damskus” (Asari, 1994:34). Fungsi masjid sebagai rumah ibadah dan sebagai lembaga pendidikan berjalan secara harmonis. Pada umumnya masjid memang dibangun sebagai tempat ibadah, dengan fungsi akademis sebagai sekunder. Akan tetapi, tak jarang pula masjid dibangun dengan niat awal sebagai lembaga pendidikan tanpa mengabaikan fungsinya sebagai tempat ibadah. Sejumlah masjid bahkan diberi nama sesuai dengan nama syaikh yang mengajar di dalamnya. Beberapa bahkan secara khusus dibangun untuk seorang sarjana yang nantinya akan mengelola kegiatan pendidikan di masjid tersebut. Sekedar contoh sebut saja Masjid Al-Syafi’i, Masjid Al-Syamargani dan Masjid Abu Bakar Al-Syami, masing-masing merujuk pada nama sarjana yang mengajar di dalamnya (Asari, 1994:34).

Tahap kedua dari sejarah pendidikan Islam adalah masjid-khan, yaitu masjid yang dilengkapi dengan bangunan asrama atau pondokan bagi para siswa untuk belajar yang masih berdampingan dengan mesjid.

Ada beberapa teori yang menyatakan mengenai peran mesjid sebagai tempat pendidikan dipertimbangkan dan mulai dipikirkan adanya asrama atau khan sebagai tempat pemondokan bagi para siswa. Diantara pertimbangan itu

adalah:

“Pertama, kegiatan pendidikan di masjid dianggap telah mengganggu fungsi utama lemabaga itu sebagai tempat ibadah. Kedua, berkembangnya kebutuhan ilmiah sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan. Dengan berekembangnya ilmu pengetahuan, banyak ilmu tidak bisa lagi sepenuhnya diajarkan di masjid. Ketiga, timbulnya orientasi baru dalam penyelenggaraan pendidikan. Sebagian guru mulai berfikir untuk mendapatkan rizki melalui kegiatan pendidikan. Ada diantara pengajar yang pekerjaannya sepenuhnya memang mengajar, oleh karena itu dibangunlah lembaga lain karena jaminan itu tidak mungkin diperolehnya di masjid (Maksum, 1999: 56).

Berbeda dengan mesjid pada umumnya, mesjid-khan ini dilengkapi dengan bangunan asrama untuk tempat tinggal para siswa yang akan menuntut ilmu dari berbagai penjuru kota. Secara umum kata khan berarti penginapan, motel atau yang sejenisnya. Menurut Maqdisi seperti yang dikutip oleh Asari (1994:41) bahwa “dalam sejarah kebudayaan Islam, khan bisa pula berarti bangunan yang berfungsi sebagai gudang atau pusat perdagangan

dan ada pula khan yang secara finansial didukung oleh wakaf dan penghasilannya dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan sosial”.

Memahami istilah lembaga pendidikan mesjid-khan maka makna yang paling tepat untuk memahami kata khan adalah asrama. Pembangunan khan ini berkaitan erat dengan kepedulian umat Islam masa itu terhadap para penuntut ilmu, khususnya mereka yang berasal dari luar daerah. Sebelumnya, seorang mahasiswa luar kota harus bersusah payah mengurus sendiri tempat tinggalnya selama masa belajarnya. Khan adalah jawaban terhadap persoalan ini, khan biasanya dibangun berdampingan dengan masjid, atau setiaknya pada lokasi yang tidak jauh dari masjid dan tetap mengesankan satu kompleks terpadu.

Setelah dua tahap perkembangan di atas, barulah muncul madrasah yang khusus diperuntukkan sebagai lembaga pendidikan. Madrasah dengan demikian menyatukan kelembagaan masjid biasa dengan masjid-khan. Kompleks madrasah terdiri dari ruang belajar, ruang pondokan dan masjid.

Madrâsah dikenal sebagai sebuah lembaga pendidikan formal itu sejak abad ke-sebelas Masehi atau ke-dua belas Masehi (abad ke-lima atau ke-enam Hijriah), dimana saat itu yang terkenal dengan Madrâsah Nidzâmiyah di Kota Baghdad, Ibukota Irâq dimana lembaga ini didirikan oleh seorang Wadzîr bernama Nidzâm al-Mulk pada Dinasti Saljuk. Madrâsah ini muncul sebagai pendidikan yang resmi atau formal berawal dari pendidikan yang dilaksanakan di Masjid. Dimana Masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah shalat semata, namun jauh daripada itu Masjid dijadikan sebuah tempat untuk pendidikan. Dimana ketika dijadikan sebagai tempat pendidikan, system pembelajarannya adalah dengan cara halaqah.

Kemudian dari halaqah di Masjid ini berkembang dengan pembelajaran yang dilaksanakan dalam sebuah bangunan yang terletak di sebelah Masjid, dimana bangunan tersebut tidak terputus dengan bangunan masjid yang dikenal dengan sebutan Masjid Khân. Hal ini kemudian berkembang yang selanjutnya madrâsah berdiri sendiri dan tidak menyatu dengan Masjid. Namun, pada perkembangannya Madrâsah membutuhkan Masjid, dengan demikian di Bangunlah Masjid yang berada di lingkungan Madrâsah.

Pengertian madrasah yang dimaksud dalam fase ini tidak dimaksud seperti pengertian madrasah yang dipahami selama ini dalam konteks masyarakat Indonesia yaitu pendidikan untuk tingkat dasar dan menengah (Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyyah), akan tetapi madrasah pada fase ini merujuk pada pendidikan tinggi yang berkembang pada fase pra modern. Akan tetapi madrasah dalam arti perguruan tinggipun tidak sama persis atau tidak bisa disamakan dengan pengertian perguruan tinggi sekarang ini karena memiliki ciri-ciri yang berbeda. Hal dijelaskan oleh Hasan Asari (1999:44) sebagai berikut:

“Ciri-ciri lembaga pendidikan ini (madrasah) tidak dapat dicocokkan secara persis dengan lembaga pendidikan tinggi yang ada sekarang. Dan hal ini menimbulkan kesulitan besar dalam penerjemahan kata “madrasah” itu sendiri. Para peneliti sejarah pendidikan Islam yang menulis dalam bahasa-bahasa barat menerjemahkan kata “madrasah” secara bervariasi, misalnya: ‘schule’ atau ‘hochschule’ (Jerman), ‘school’, ‘college’, atau ‘academy’ (Inggris).

“Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan Nidzamiyyah di Baghdad” (Ainurrafiq dkk, 2005:31). Sebuah lembaga pendidikan yang bertujuan menyebarkan pemikiran Sunni untuk menghadapi tantangan pemikiran Syi’ah, menyediakan tenaga-tenaga pengajar dari kalangan Sunni dan menyebarkannya ke berbagai daerah, serta membentuk kelompok pekerja Sunni untuk berpartisipasi menjalankan pemerintahan.

Akan tetapi ada juga yang berpendapat bahwa madrasah didirikan jauh sebelum abad ke 5 Hijrah seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abd Rahim Ghanimah dalam Karyanya Al-Jami’ah Al-Islamiyah Al-Kubra yang dikutip oleh Maksum (1999:60) sebagai berikut: “Kata madrasah belum dijumpai pada sumber-sumber sejarah hingga kira-kira akhir abad ke-4 Hijriyah. Akan tetapi banyak bukti yang signifikan justru menunjukkan bahwa madrasah telah beridiri sejak abad ke-4 Hijriyyah dan dihubungkan dengan penduduk Naisabur”.

Hal senada juga diungkapkan oleh Asari (1994: 48) mengutip pendapat Ahmad Amin dalam karangannya Dhuha’ Al-Islam yang merujuk pendapatnya Al-Dzahabi sebagai berikut:

“Hal ini tidak bisa dipertahankan, sebab penelitian belakangan membuktikan bahwa bahkan sebelum berdirinya Dinasi Saljuq sekalipun “madrasah” telah dikenal secara luas di daerah Nisyapur-yang di bawah naungan Dinasi Samaniyah (204-395H/819-1005M) berkembang menjadi salah satu pusat budaya dan pendidikan terbesar di dunia Islam sepanjang abad ke-4 H/10 M. Daerah yang terkenal sebagai tempat kelahiran madrasah ini telah memiliki banyak madrasah sebelum era Nizam Al-Mulk”.

Namun demikian tidak disangkal bahwa pengaruh Madrasah Nizahmiyyah melampaui pengaruh madrasah-madrasah yang didirikan sebelumnya. Bahkan Ahmad Syalabi (1954:116) “menjadikan pendirian Madrasah Nizamiyah sebagai pembatas untuk membedakannya dengan era pendidikan Islam sebelumnya”.

Perkembangan Madrasah di Indonesia

Banyak teori yang berpendapat tentang sejarah munculnya madrasah di Indonesia, tetapi sangat sulit dipastikan kapan istilah madrasah digunakan sebagai salah satu jenis pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Namun dapat dipastikan bahwa madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20.

Namun demikian perkembangan madrasah awal abad 20 tidak bisa disamakan dengan perkembangan madrasah di Timur Tengah saat itu yang sama-sama sedang berkembang. “Perkembangan madrasah di Timur-Tengah sudah memasuki masa modern yang sudah mengadopsi ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum” (Maksum, 1999:98). Sementara sebelum abad 20 tradisi pendidikan Islam di Indonesia belum mengenal istilah madrasah, kecuali pengajian Al-Quran, masjid, pesantren, surau, langgar dan tajug. Dalam praktek pendidikannya tidak menggunakan sistem kelas seperti sekolah modern, namun sistem penjenjangan dilakukan dengan melihat kitab yang diajarkan.

Munculnya madrasah pada abad 20 ini ada juga yang meperkirakan berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Mengapa madrasah muncul pada masa kolonial Belanda sekitar awal abad ke-20, bukan sebelumnya. Ada dua analisis: pertama, karena beberapa kali usulan Volksraad (Dewan Rakyat) agar pelajaran agama Islam dimasukkan sebagai mata pelajaran di perguruan umum selalu ditolak oleh Belanda. Belanda bahkan memberlakukan ordonansi Indische Staatsregeling pasal 179 ayat 2 yang menyatakan bahwa “pengajaran umum adalah netral, artinya bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Pengajaran agama hanya boleh berlaku di luar jam sekolah”(Djaelani 1982:36-37). Sampai dengan akhir pemerintahan Belanda di Indonesia, pengajaran agama di sekolah umum atau open baar orderwijs tidak pernah menjadi kenyataan. Hal ini menumbuhkan inisiatif untuk mendirikan model sekolah di luar kebijakan Belanda yang memberi muatan pelajaran agama Islam lebih, namun berbeda dengan komposisi materi PAI di pesantren dan sejenisnya yang telah ada sebelumnya. Lembaga tersebut adalah madrasah.

Dari berbagai literatur tentang munculnya madrasah di Indonesia, dapat dijelaskan bahwa paling tidak ada dua faktor yang melatarbelakangi munculnya madrasah di Indonesia. Dua faktor tersebut yaitu yang pertama adalah adanya gerakan pembaharuan Islam di wilayah Timur Tengah dan Mesir di mana banyak pelajar-pelajar Indonesia yang belajar di Timur-Tengah setelah kembalinya dari wilayah tersebut membawa semangat pembaharuan ke tanah air. Kedua, adalah respon terhadap kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang sedang menjajah Indonesia saat itu. Pemerintah melakukan standar ganda dalam politik etiknya. Pemerintah penjajah hanya mengembangkan pendidikan yang memiliki manfaat bagi pemerintah penjajah saja. Perbaikan pendidikan berbasis Islam justru mereka khawatirkan berdampak buruk bagi kepentingan penjajah. Pada awalnya pemerintah penjajah akan menggunakan “tradisi pendidikan” pribumi untuk menerapkan pendidikan dalam rangka politik etiknya akan tetapi hal ini tidak terjadi, hal ini diungkapkan oleh A. Steenbrink yang dikutip oleh H. Maksum (1998:93) dinyatakan bahwa:

“Dalam membahas penelitian yang diperintahkan Gubernur Jenderal Fort van der Capellen 1819, seorang sarjana Belanda Brugmen menduga bahwa pemerintah akan menerapkan pendidikan yang berdasarkan pribumi murni, secara teratur sesuai dengan masyarakat desa, yang dihubungkan erat pada pendidikan Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini dimungkinkan dengan alasan politik asosiasi Hindia Belanda. Tetapi hal ini dalam kenyataannya tidak terbukti.”

Hal tersebut tidak terlaksana karena pada tataran teknis usulan tersebut sulit untuk direalisasikan karena, tradisi pendidikan Islam saat itu dianggap tidak layak diadopsi baik dari sisi kurikulum, manajerial atau metodenya. Pada akhirnya pemerintah Hindia Belanda memilih bentuk persekolahan sebagaimana yang sudah dikembangkan jauh sebelumnya khususnya dalam rangka misionaris (Maksum: 1999:93).

Tumbuhnya Madrasah pada Masa Penjajahan

Pertama kali penjajah menginjakkan kakinya di bumi nusantara, mereka menjumpai bahwa sebagian besar penduduknya beragama Islam yang telah disebarkan oleh para wali, dan pada saat itu pula sudah bentuk-bentuk pendidikan yang dikelola oleh masyarakat muslim dengan menekankan pada aspek-aspek pendidikan agama Islam. Pendidikan ini berlangsung di rumah-rumah, tajuk, mesjid, langgar yang di asuh oleh seorang yang merasa terpanggil untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam kepada masyarakat kemudian berkembang menjadi sebuah pondok pesantren.

Dalam perkembangannya, pesantren ini menjadi sesuatu yang menarik bagi para sultan dan dianggap sangat berjasa. Akhirnya tidak sedikit pesantren yang mendapat perhatian khusus dari sultan berupa bantuan. “Salah satu contohnya adalah Pesantren Tegalsari yang merupakan hadiah sultan bagi para kyai yang dianggap telah banyak jasanya (Shaleh, 2004:13). Sampai pada abad 19 Pondok Pesantren Tegalsari menjadi pondok terkemuka yang santrinya berasal dari berbagai penjuru tanah air.

Ketika rombongan dagang VOC dan kemudian pemerintah kolonial Hindia Belanda menguasai wilayah nusantara sejak tahun 1671, dalam jangka waktu yang cukup lama mereka membiarkan saja kegiatan-kegiatan pendidikan termasuk pesantren berjalan apa adanya. Namun tatkala keperluan akan tenaga terampil tingkat rendah mulai meningkat, pemerintahan kolonial juga menyelenggarakan pengajaran melalui sistem persekolahan yang diselenggarakan sangat diskriminatif, terutama bila hal itu menyangkut penduduk pribumi.

Sistem persekolahan pemerintah Hindia Belanda untuk rakyat Indonesia pada mulanya terbatas untuk kalangan bangsawan, yakni Sekolah Kelas Satu (Hollands Inlandsche Scholl/HIS) dan Sekolah Kelas Dua (Standard School). Sekolah-sekolah ini diselenggarakan untuk tujuan mencetak pegawai-pegawai pemerintah, juga pegawai perdagangan dan perusahaan. Dalam politik pendidikan pemerintah Hindia Belanda, pendirian sekolah-sekolah ini merupakan langkah susulan setelah sebelumnya pemerintah hanya menyediakan pendidikan bagi kalangan Belanda sendiri.

Karena berbagai alasan akhirnya pemerintah Hindia Belanda mengembangkan sistem persekolahan untuk rakyat luas dengan biaya murah. Mulai saat ini rakyat yang pada awalnya hanya memperoleh pendidikan dari lembaga-lembaga pendidikan tradisional termasuk dari pesantren, akhirnya memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda ini. Dengan munculnya gerakan ini dan respon dari masyarakat yang cukup bagus, maka dirasakan oleh lembaga-lembaga pendidikan tradisional adanya “saingan” dalam pendidikan.

Perkembangan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang begitu gencar dan diterima oleh rakyat Indonesia telah menggugah para tokoh Islam untuk menanggapi fenomena ini. Meskipun pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan yang luas kepada warga pribumi untuk memperoleh pendidikan, namun masih nampak kebijakan yang bersifat diskriminatif. Bagaimanapun kebijakan ini tidak akan membuat cerdas bangsa Indonesia, karena kesempatan pendidikan yang diberikan oleh penjajah hanya sampai pada pendidikan dasar. Hal ini tentu sangat bertolak belakang dengan prinsip-prinsip Islam yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia yaitu kesempatan memperoleh hak yang sama dan kesetaraan. Kesempatan ini juga harus menjadi momen bagi tokoh Islam saat itu untuk memberikan yang lebih baik dalam pendidikan Islam baik dari sisi metode, kurikulum, materi, struktur kelembagaan, manajerial dan sebagainya agar pendidikan Islam dapat diterima oleh masyarakat dan mampu bersaing dengan sekolah yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda.

Bersamaan dengan hal itu, pemerintah Belanda tidak begitu respon dengan perkembangan pendidikan Islam, mereka menganggap percuma merespon dan memberikan kebijakan tertentu terhadap pendidikan Islam karena pendidikan Islam dianggap pendidikan moral keagamaan yang memberikan motivasi spiritual dan mungkin bisa membangkitkan semangat perjuangan untuk melawan penjajahan.

Dipicu oleh semangat Pan Islamisme dan gerakan pembaharuan Islam di Timur Tengah dan Mesir yang imbasnya merambah ke tanah air melalui pelajar-pelajar yang kembali setelah menyelesaikan studinya, baik dari Mesir maupun yang telah bermukim di Makkah dan Madinah dengan tujuan belajar agama selama dua, empat sampai enam tahun. Mereka membangkitkan gerakan pembaruan di bidang pendidikan Islam. Di Sumatera muncul antara lain Madrasah Adabiyah yang didirikan di Padang oleh Syaikh Abdullah Ahmad pada tahun 1908. Pada tahun 1915 madrasah ini berubah menjadi HIS Adabiyah. Sementara itu pada tahun 1910 Syaikh M. Taib Umar juga mendirikan Madrasah Shcool di Batusangkar, sedangkan H. Mahmud Yunus pada tahun 1918 mendirikan Diniyah Schoel sebagai lanjutan pada Madrasah School.

Di Aceh didirikan madrasah yang pertama pada tahun 1930 bernama Saadah Adabiyah oleh Tengku Daud Beureuh. Madrasah Al-Muslim oleh Tengku Abdul Rahman Munasah Mencap, Madrasah Sarul Huda dan banyak madrasah lainnya. Hal serupa terjadi juga di Sumatera Timur, Tapanuli, Sumatera Selatan, Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain-lain.

Organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan banyak mendirikan madrasah dan juga sekolah umum dengan nama, jenis dan tingkatan yang bermacam-macam diantaranya:

- 1) Muhammadiyah (1912) mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin/Mu'allimat, Muballighin/Muballighat dan Madrasah Diniyah
- 2) Al-Irsyad (1913), mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tajhiziyah, Muallimin dan Tahassis.
- 3) Matlaul Anwar di Menes Banten mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah dan Diniyah.

- 4) Pesatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) (1928) mendirikan madrasah dengan berbagai nama, diantaranya Madrasah Tarbiyah Islamiyah, Madrasah Awaliyah, Tsanawiyah, Kuliyyah Syariah.
- 5) Nahdhatul Ulama (1926) mendirikan Madrasah Awaliyah, Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin Wustha dan Muallimin Ulya. (Shaleh, 2004:20)

Pada masa kesultanan, madrasah memperoleh dukungan dan bantuan, bahkan ada yang didirikan atas nama sultan sehingga madrasah dapat tumbuh dan berkembang dengan mutu lulusan dan kualitas penyelenggaraan yang baik. Namun di masa kolonial, sesuai dengan tugas kolonialisme, madrasah dikategorikan sebagai sekolah liar, bahkan pemerintah kolonial telah mengeluarkan peraturan-peraturan yang membatasi bahkan mematikan sekolah partikelir termasuk madrasah.

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena kekhawatiran akan timbulnya militansi kaum muslimin terpelajar. Pada tahun 1882 pemerintah Belanda membentuk suatu badan khusus yang bertugas mengawasi kehidupan beragama dan pendidikan Islam yang disebut Priesterraden (Zuhairini, 1995: 149). Atas nasihan badan inilah maka pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda dalam mengawasi pendidikan Islam mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Ordonansi Guru. Kebijakan ini mewajibkan guru-guru agama untuk memiliki surat izin dari pemerintah. Latar belakang Ordonansi Guru ini sepenuhnya bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga pendidikan agama tidak menjadi faktor pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah.

Dalam perkembangannya, Ordonansi Guru sendiri mengalami perubahan dari keharusan guru agama mendapatkan surat izin menjadi keharusan guru agama itu cukup melapor dan memberitahu saja. Selain Ordonansi Guru, pemerintah Hindia Belanda juga pada tahun 1932 mengeluarkan peraturan yang dapat memberantas dan menutup sekolah yang tidak ada izinya, atau memberikan pelajaran yang tidak disukai oleh pemerintah Hindia Belanda, kebijakan ini disebut Ordonansi Sekolah Liar (Wilde School Ordonanite). Ketentuan ini mengatur bahwa penyelenggaraan pendidikan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pemerintah. Laporan-laporan mengenai kurikulum dan keadaan sekolah harus diberikan secara berkala. Ketidak lengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan pendidikan di kalangan masyarakat tertentu.

Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penajajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Walaupun diakui lebih memberikan kebebasan dari pada penajajah Belanda, tetapi kebijakan dasar pemerintah penajajah Jepang berorientasi pada penguatan kekuasaannya di Indonesia.

Untuk memperoleh dukungan dari umat Islam, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan yang menawarkan bantuan dana bagi sekolah dan madrasah. Berbeda dengan kolonial Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa pemerintahan sebelumnya. Namun demikian, pemerintah Jepang tetap mewaspadaai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendudukan Jepang di Indonesia.

Madrasah pada Masa Awal Kemerdekaan

Ditengah-tengah berkobarnya revolusi fisik, pemerintah RI tetap membina pendidikan agama pada khususnya. Pembinaan pendidikan agama itu secara formal institusional dipercayakan kepada Departemen Agama dan Departemen P&K (Depdikbud). Oleh karena itu maka dikeluarkanlah peraturan-peraturan bersama antara kedua departemen tersebut untuk mengelola pendidikan agama di sekolah-sekolah umum (negeri dan swasta). Adapun pembinaan pendidikan agama di sekolah agama ditangani oleh Departemen Pendidikan Agama sendiri.

Pendidikan agama Islam untuk sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946. Sebelum itu pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan sendiri-sendiri di masing-masing daerah. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946.

Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Oreintasi usaha Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi ummat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah, di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Secara lebih spesifik, usaha ini ditangani oleh satu bagian khusus yang mengurus masalah pendidikan agama. dalam salah satu dokumen disebutkan bahwa tugas bagian pendidikan di lingkungan Departemen Agama itu meliputi (1) Memberi pengajaran agama di sekolah negeri dan partikular (2) memberi pengetahuan umum di madrasah, dan (3) mengadakan pendidikan guru agama (PGA) dan pendidikan hakim Islam negeri (PHIN). Dengan tugas-tugas seperti di atas, Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih luas di Indonesia. Dalam

kaitannya dengan perkembangan madrasah, Departemen tersebut menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan. Di samping melanjutkan usaha-usaha yang dirintis oleh sejumlah tokoh seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, KH. Ilyas, Mahmud Yunus dll. Departemen Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu pendidikan.

Perkembangan madrasah yang paling spektakuler pada masa orde lama adalah dengan didirikannya Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam negeri (PHIN) (Maksum, 1999:124). Hal ini dianggap spektakuler karena berdirinya kedua lembaga pendidikan Islam ini sebagai momentum penting perkembangan madrasah karena: Pertama, Pendidikan ini akan mencetak tenaga-tenaga profesional dalam pengembangan agama Islam, kedua, Pendidikan Guru Agama akan mencetak calon-calon guru agama yang fokus pada pendidikan agama Islam. Khusus mengenai PGA, akarnya memang sudah dimulai sejak masa sebelum kemerdekaan khususnya di wilayah Minangkabau, tetapi dengan pendirian PGA oleh Departemen Agama, kelanjutan madrasah di Indonesia mendapat jaminan yang lebih strategis. PGA menghasilkan guru-guru agama yang secara praktis akan menjadi motor bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan madrasah. Ketersediaan guru yang disuplai oleh lembaga tersebut semacam menjamin perkembangan madrasah di Indonesia.

Dari catatan Mahmud Yunus yang dikutip oleh Ainurrofik (2005:44) diperoleh data bahwa “sejarah perkembangan PGA pada masa itu bermula dari program Departemen Agama yang ditangani oleh Abdullah Sigit sebagai penanggungjawab bagian pendidikan”. Pada tahun 1950 bagian ini membuka dua lembaga pendidikan yang dikatakan sebagai madrasah profesional keguruan, yaitu : Sekolah Guru Agama Islam (SGAI). Sekolah ini terdiri dari dua jenjang yaitu jenjang jangka panjang yang selama lima tahun yang diperuntukkan bagi siswa lulusan SR/MI dan jenjang jangka pendek yang hanya ditempuh selama dua tahun yang diperuntukkan bagi lulusan SMP/Madrasah Tsanawiyah. Pada perkembangan selanjutnya SGAI berubah menjadi Pendidikan Guru Agama (PGA) dan SGHI berubah menjadi Sekolah Hakim Guru Agama (SHGA).

Kurikulum Madrâsah di Indonesia

Madrâsah di Indonesia mulai terkenal setelah awal abad ke-20. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia. Dilihat dari fase perkembangan Madrâsah di Indonesia memiliki 2 fase; Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang muncul setelah pesantren dan sekolah mengadopsi system pesantren dan sekolah. Madrasah di Indonesia memiliki jenjang yang sama dengan sekolah umum yaitu Madrasah Ibtidaiyah dengan lama belajar 6 tahun sama dengan Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sama dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan lama belajar tiga tahun dan Madrasah Aliyah baik negeri atau swasta sama dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan tiga tahun lama belajar. (Yulia Pramusinta, 2015).

Dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya madrasah di bawah naungan DEPAG, maka ia mempunyai jenjang yang sederajat dengan lembaga sekolah umum di bawah kementerian pendidikan dan budaya, dimana dalam lembaga Rudhatul Afthal (RA) yang sederajat dengan Taman Kanak-Kanak (TK), kemudian Madrasah Ibtida'iyah (MI) yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD), Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang sederajat dengan Sekolah lanjutan tingkat Pertama (SLTP) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP), kemudian Madrasah Aliyah (MA) yang sederajat dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Dilihat dari segi perkembangan Madrâsah di Indonesia pasca Kemerdekaan Indonesia itu terdiri dari 3 Fase sebagai berikut; fase pertama, itu terjadi tahun 1945-1974, pada saat itu Madrâsah difokuskan pada pendidikan yang banyak berisikan muatan agama dan juga memasukkan ilmu umum namun dalam jumlah yang sedikit. Pada fase ini Madrâsah berada dalam naungan Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI).

Menurut penulis, pada fase pertama ini, yang sebagai fase pondasi berdirinya madrasah pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam fase awal ini muatan agamanya mendominasi dalam madrasah. Dikarenakan madrasah mempunyai ciri khas dalam kurikulumnya, yakni muatan agamanya mendominasi. Namun, dalam fase ini madrasah juga terdapat muatan pelajaran umum, namun skalanya kecil. Kurikulum ini berada dalam naungan DEPAG RI. Sehingga mempermudah dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan madrasah .

Fase kedua, itu terjadi tahun 1975-1990 dengan adanya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yang diberlakukan oleh Presiden maka di minta Madrâsah untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Adapun isi SKB antara lain; penyataran ijazah dimana ijazah lulusan Madrâsah sama dengan Ijazah sekolah umum dalam hal nilai, siswa yang lulus dari sekolah Madrâsah dapat melanjutkan pendidikan ke sekolah umum yang setingkat lebih tinggi, Siswa Madrâsah ketika pindah ke sekolah umum yang sederajat. Pemberlakuan SKB tiga Menteri ini meningkatkan keberadaannya sebagai Institusi Pendidikan Islam yang

lebih baik dari segi agama di tambah dengan adanya pendidikan umum dapat meningkatkan pengetahuan siswa akan ilmu-ilmu umum.

Menurut Penulis, fase kedua ini, dengan adanya surat keputusan bersama (SKB) tiga menteri, dimana madrasah diminta meningkatkan mutu pendidikan, karena dalam keputusan SKB adanya penyetaraan Ijazah, dimana ijazah madrasah setara dengan ijazah sekolah umum dalam masalah nilai. Para siswa ketika lulus dari madrasah dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan umum, begitupula ketika siswa mengalami pindah karena suatu hal, dari madrasah ke pendidikan umum, maka bisa langsung ke kelas yang setara artinya ketika pindah kelas X MA maka bisa langsung ke X SMA dan seterusnya. Dengan adanya keputusan ini, maka madrasah bisa meningkatkan kualitas dari pendidikannya, dengan melakukan inovasi, kreasi dalam kurikulumnya sehingga ketika para siswa lulus memiliki keilmuan sebagaimana yang telah diharapkan oleh SKB.

Fase ketiga, dengan diberlakukannya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana disebutkan, Madrâsah ialah sekolah yang berbasis Agama Islam. Dengan adanya pemberlakuan UU tersebut maka kurikulum dalam Madrâsah ialah kurikulum sekolah dengan menambahkan kurikulum yang bermuatan agama dimana sebagai ciri dari khasnya (Muhammad Nasir, 2015:149). Madrâsah dengan bermuatan kurikulum agama sebagai ciri dari khasnya dan juga bermuatan kurikulum sekolah sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No. 2 tahun 1989, maka akan menjadikan pendidikan yang mempunyai keterampilan dengan basis kompetensi tertentu sehingga alumninya dapat bersaing dalam dunia luar. (Darmawati & Parno, 2013:70).

Pada fase ketiga ini, Pendidikan Islam ini terintegrasi dengan pendidikan umum dimana dalam sistem pendidikannya dengan difokuskan pada tiga aspek pengembangan yaitu; pertama, Aspek kognitif ialah pada segi pengetahuan peserta didik, kedua, Aspek Psikomotorik ialah pada pengembangan keterampilan atau skill peserta didik, dan ketiga, Aspek Afektif ialah pada pengembangan sikap peserta didik. (Hamzah, Syeh Hawib, 2015:50). Pengembangan dalam Pendidikan Islam itu disesuaikan dengan kebutuhan di tingkat sekolah masing-masing. (Mukhamad Ilyasin, 2006:80). Kemudian dalam menghadapi dinamika masyarakat yang heterogen maka pendidikan Islam harus memperhatikan harus melihat dinamika dan keragaman tersebut dimana Madrâsah dapat menyelenggarakan sistem pendidikan berbasis multikultur. (Fachrul Ghazi, 2012:78). Kemudian dalam perkembangannya di saat ini Pendidikan Islam difokuskan pada Pada perkembangannya di masa sekarang, pendidikan Islam juga sangat mengedepankan pendidikan karakter. (Agus Setiawan, 2014).

Dengan demikian, fase ketiga ini madrasah diminta menampilkan dan menonjolkan kurikulum yang bermuatan agama, dimana hal tersebut merupakan dari ciri khasnya. Selain itu juga menambahkan kurikulum pendidikan umum sebagaimana telah tercantum dalam SISDIKNAS, supaya setelah lulus para siswa dapat bersaing dengan dunia luar. Para siswa ditempa pengetahuannya, skillnya, dan juga sikapnya sehingga dengan sekolah umum tidak terdapat perbedaan yang berarti. Dalam fase ketiga ini ada aspek yang dicapai oleh siswa di madrasah; pertama, aspek kognitif yakni yang berhubungan dengan pengetahuan siswa akan teori. Aspek kedua yakni aspek psikomotorik yakni yang berhubungan dengan skill atau keterampilan siswa. Siswa bukan hanya memiliki pengetahuan namun juga dituntut memiliki skill yang bagus. Karena dengan keterampilan siswa dapat mengimplementasikan dari pengetahuannya. Aspek ketiga, aspek afektif yakni yang berhubungan dengan sikap atau akhlak siswa. Para siswa diharapkan dapat memiliki akhlak yang bagus sebagai buah dari pengetahuan dan keterampilan. Adapun menurut penulis skema dalam perjalanan fase madrasah adalah sebagai berikut:

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Madrasah berasal dari kata darasa yang berarti tempat duduk untuk belajar. Dalam konteks Indonesia istilah madrasah ini telah menyatu dengan istilah sekolah formal atau perguruan di bawah binaan Departemen Agama. Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam mulai didirikan dan berkembang di dunia Islam sekitar abad 11-12 M (abad ke 5 H), khususnya ketika Wazir Bani Saljuk, Nidzam Al-Mulk mendirikan Nidzamiyyha di Baghdad.

Madrasah telah marak di Indonesia sebagai lembaga pendidikan sejak awal abad 20, hal itu berbarengan dengan munculnya Ormas Islam, semisal Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Perkembangan madrasah pada masa awal kemerdekaan sangat terkait dengan peran Departemen Agama yang mulai resmi berdiri sejak 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Departemen Agama dapat dikatakan sebagai representasi umat Islam dalam memperjuangkan penyelenggaraan pendidikan Islam secara lebih meluas di Indonesia. Dalam kaitannya dengan perkembangan madrasah di Indonesia, Departemen Agama menjadi andalan yang secara politis dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang serius di kalangan pemimpin yang mengambil kebijakan.

REFERENSI

- Agus Setiawan, *Prinsip Pendidikan Karakter Dalam Islam: Studi Komparasi Pemikiran Al-Ghazali dan Burhanuddin Al-Zarnuji*, dalam Jurnal *Dinamika Ilmu*, Vol 14 No 1, 2014
- Airnurrofiq Dawam, *Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren*, Listafariska, 2005
- Darmawati & Parno, *Analisis pengembangan kurikulum berbasis kompetensi (studi kurikulum program studi muamalah jurusan syariah dan ekonomi Islam STAIN Samarinda*. dalam Jurnal *FENOMENA* Vol 5 No 2, 2013
- Djaelani Timur, *Kebijaksanaan Peminaan Kelembagaan Agama Islam*, Dirjen Binbaga Islam, Jakarta, 1982
- Fachrul Ghazi, *Pendidikan Multikulturalisme*. dalam Jurnal *FENOMENA* Vol 4 No.2, 2012
- Hamzah, Syeh Hawib. *Aspek Pengembangan Peserta Didik: Kog-nitif, Afektif, Psikomotorik*, dalam Jurnal *Dinamika Ilmu*, Vol. 12 No. 1, 2012
- Hasan Asari, *Menyingkap Zaman Keemasan Islam*, Mizan, 1994; Bandung
- Mukhamad Ilyasin, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan dan Urgensinya dalam Implementasi otonomi Sekolah*, dalam Jurnal *Dinamika Ilmu*, Vol. 6 No. 1, 2006
- Maksum, *Sejarah dan Perkembangannya*, Logos Wacana Ilmu, 1999. Jakarta
- Muhammad Nasir, *Kurikulum Madrasah: Studi Perbandingan Madrasah Di Asia*, Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 9, Nomor 2, Oktober 2015, hal. 149
- Yulia Pramusinta, *Konsep Madrasah dengan Pendekatan Filosofis*, *AKADEMIKA*, Volume 9, Nomor 2, Desember 2015
- Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, Bumi Aksara, 1995. Jakarta